

**PENDAYAGUNAAN SISTEM JARINGAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI OLEH ASOSIASI PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA (APEKSI) DALAM Mendukung Peningkatan
TATA PEMERINTAHAN KOTA
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**THE EMPOWERMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION
NETWORK SYSTEM BY ASSOCIATION OF INDOONESIAN
MUNICIPALITIES (APEKSI) TO SUPPORT THE INCREASE OF CITY
GOVERNMENT ORDER IN THE EASTERN PART OF INDONESIA**



A.NUR FITRI

P1400210001

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**PENDAYAGUNAAN SISTEM JARINGAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI OLEH ASOSIASI PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA (APEKSI) DALAM Mendukung Peningkatan
TATA PEMERINTAHAN KOTA
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Komunikasi

Disusun dan diajukan oleh

A. Nur Fitri

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pendayagunaan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi
Oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Dalam Mendukung Peningkatan Tata Pemerintahan Kota di
Kawasan Timur Indonesia

Nama : A. Nur Fitri

N.P.M : P1400210001

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Kajian Media dan Dinamika Politik

Makassar, Agustus 2013

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc

Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si

NIP.19520412 197603 1 017

NIP. 19620307 198811 1 002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. Nur Fitri
Nomor Pokok : P1400210001
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2013

Yang menyatakan,

A. Nur Fitri

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari permasalahan yang diangkat timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap sistem dan jaringan informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) khususnya wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Penulis bermaksud menyumbangkan konsep bahwa sistem dan jaringan informasi komunikasi yang digunakan selama ini telah mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meskipun belum seluruhnya memanfaatkan media baru. Demikian pula penerapan *electronic government* yang dipandang mendesak oleh informan untuk peningkatan tata pemerintahan kota, sebaiknya didukung dengan kapasitas aparat tentang teknologi informasi dan komunikasi.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M. Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi sekaligus, sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M. Si sebagai Anggota Komisi Penasihat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian ini, pelaksanaan

penelitiannya sampai dengan penulisan tesis ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bpk Drs. H. Balasong (alm) dan Ibu Nuraeni (alm), suami, Idwar Anwar dan anak-anak tercinta, kepada saudara-saudara dan tak terkecuali kepada kawan-kawan Komunikasi Pasca (Kompas) UNHAS 2010, dan yang terakhir ucapan terimakasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin.

Makassar, Agustus 2013

Penulis,

ABSTRAK

A. NUR FITRI. *Pendayagunaan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam Mendukung Peningkatan Tata Pemerintahan Kota di Kawasan Timur Indonesia* (dibimbing oleh Hafied Cangara dan Andi Alimuddin Unde)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem informasi yang diimplementasikan oleh APEKSI dalam menunjang peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia, (2) model dan proses jaringan komunikasi yang terstruktur dan diberdayakan dalam APEKSI untuk peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia dan (3) untuk mengetahui kelebihan dan hambatan penggunaan jaringan informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh APEKSI untuk peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sumber data berupa data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap informan serta observasi dalam menemukan pola jaringan komunikasi dan sistem informasi pada APEKSI Komwil VI. Penelitian ini memfokuskan pada analisis dan menguraikan sistem jaringan informasi dan komunikasi yang digunakan dengan melakukan upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparat pemerintah di lingkungan Apeksi Komisariat Wilayah VI telah memanfaatkan media telepon, selular, sms, serta *website* untuk menjalankan aktifitas mereka dalam pekerjaan dan roda pemerintahan dan memandang penerapan *electronic government* sebagai hal yang mendesak. Namun tidak demikian halnya dengan penggunaan sosial media seperti *facebook* dan *twitter* sebagai media baru yang memungkinkan mereka menciptakan jaringan yang lebih luas dengan biaya yang cukup efisien. Jaringan komunikasi yang telah berjalan di Apeksi melalui forum-forumnya seperti rapat kerja wilayah, musyawarah komisariat, dan lain-lain serta penyelenggaraan berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan studi banding akan menjamin keberlangsungan Apeksi. Keberadaan asosiasi yang menghimpun pemerintah kota di beberapa daerah adalah satu langkah strategis untuk menciptakan kerjasama antar daerah. Namun hal tersebut membutuhkan dukungan informasi dan jaringan komunikasi yang memadai dan berkualitas.

A.NUR FITRI. *The empowerment of Information and Communication Network System By Association of Indonesian Municipalities (APEKSI) to Support the Increase of City Government Order in the Eastern Part of Indonesia* (Supervised by Hafied Cangara and Andi Alimuddin Unde)

This study aims to determine (1) the information system implemented by APEKSI in supporting the Improvement of Municipal Governance Order in Eastern Indonesia, (2) models and processes of structured communication network and empowered in APEKSI for improved urban governance in Eastern Indonesia and (3) to know the strengths and barriers to the use of information and communication network applied by APEKSI for urban governance improvement in Eastern Indonesia.

This type of research is qualitative. Data sources are data obtained directly by using questionnaires and interviews with informants and observation in finding patterns of communication networks and information systems on APEKSI Komwil VI. This study focuses on the analysis and explains the information and communication network systems used to conduct exploration efforts and clarification about a phenomenon or social reality.

The result shows that most of the government officials in the Commissariat APEKSI Region VI has leveraged mobile phone media, text messeging, as well as the website to carry out their activities in the work place and governance and believe that the implementation of electronic government is urgent. But not for the use of social media such as facebook and twitter as new media that lets them create a wider network at considerable cost efficient. Communication network that has been running in APEKSI through the forums like regional working meeting, commissariat discussion, and others as well as the implementation of various activities such as seminars, workshops, technical guidance, and comparative studie s will ensure APEKSI sustainability. The association existence uniting city government in some areas is a strategic move to create inter-regional cooperation. However, it requires adequate and qualified information support and communication.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Konsep	9
1.Sistem Informasi.....	9
2. Komunikasi Organisasi.....	26
3.Good Governance	38
4.Otonomi Daerah dan Kerjasama antar pemerintahan (<i>Intergovernmental network</i>).....	41

	B. Teori Pendukung	47
	C. Hasil Penelitian yang relevan	51
	D. Kerangka Berpikir	54
BAB III	METODE PENELITIAN	56
	A. Tipe Penelitian	56
	B. Lokasi Penelitian	58
	C. Jenis dan Sumber Data	69
	D. Informan Penelitian	59
	E. Teknik Pengumpulan Data	61
	F. Variabel Penelitian	62
	G. Teknik Analisis Data	62
	H. Definisi Operasional	62
	I. Waktu Penelitian	63
	J. Keterbatasan dalam Penelitian.....	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
	A. Hasil Penelitian	65
	1. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.....	65
	2. Tabulasi Data Penelitian	76
	B. Pembahasan	102
BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Gambar 1 Siklus Informasi	11
2. Gambar 2 Lima Komponen Sistem Informasi	13
3. Gambar 3 Unsur-Unsur Komunikasi	28
4. Gambar 4 Kerangka Berpikir	58
5. Gambar 5 Alur Pengorganisasiam Kerjasama dalam Kerangka LoGic Project	75
6. Gambar 6 Perubahan Alur Pengorganisasian Kerjasama Kota Pasca LoGIC Project	78
7. Gambar 7 Struktur Organisasi Apeksi	79
8. Gambar 8 Perubahan Struktur Organisasi Apeksi	79
9. Gambar 9 Peta Jaringan Apeksi	111

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
10. Tabel 1 Jadwal Penelitian	66
11. Tabel 2 Penggunaan Alat Telekomunikasi	82
12. Tabel 3 Intensitas akses perminggu	84
13. Tabel 4 Diseminasi Informasi dari <i>website</i>	88
14. Tabel 5 Jenis Kebutuhan Informasi	93
15. Tabel 6 Informasi yang sering diakses melalui website APEKSI	94
16. Tabel 7 Pemilikan akun sosial	95
17. Tabel 8 Fungsi akun sosial	96
18. Tabel 9 Manfaat sistem infokom APEKSI	103
19. Tabel 10 Komunikasi antaranggota APEKSI	105

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Halaman
1. Grafik 1 Penggunaan alat komunikasi Asisten I	82
2. Grafik 2 Penggunaan alat komunikasi Kabag Pemerintahan dan Ekbang	83
3. Grafik 3 Akses <i>website</i> APEKSI	84
4. Grafik 4 Intensitas akses perminggu	85
5. Grafik 5 Kecepatan akses <i>website</i>	86
6. Grafik 6 <i>Content website</i>	87
7. Grafik 7 Diseminasi informasi dari <i>website</i>	88
8. Grafik 8 Media penyebaran informasi	89
9. Grafik 9 Penyebaran Informasi melalui internet	91
10. Grafik 10 Kegiatan APEKSI	92
11. Grafik 11 Jenis kebutuhan Informasi	93
12. Graffik 12 Informasi yang sering diakses melalui <i>website</i> APEKSI	94

13. Grafik 13 Pemilikan akun sosial	96
14. Grafik 14 Fungsi akun sosial	97
15. Grafik 15 Persepsi tentang <i>e-govt</i>	94
16. Grafik 16 Bentuk <i>e governmnet</i>	99
17. Grafik 17 Kapasitas <i>bandwith</i>	99
18. Grafik 18 Program yang ditawarkan untuk kesinambungan APEKSI	100
19. Grafik 19 Manfaat sistem infokom APEKSI	103
20. Grafik 20 Manfaat sistem infokom di kalangan kepala bagian	104
21. Grafik 21 Komunikasi antaranggota APEKSI	104
22. Grafik 22 intensitas komunikasi antar anggota APEKSI	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, kabupaten dan kota menjadi pusat penentu kebijakan untuk menyelenggarakan layanan publik. Namun setelah bertahun-tahun lepas dari sistem sentralistik, setiap daerah membutuhkan kesiapan yang berbeda-beda. Ada daerah yang sudah maju sejak berlakunya desentralisasi, namun tidak sedikit pula daerah yang memerlukan dukungan atau bantuan dari daerah lain di sekitarnya untuk berkembang.

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) yang mulai ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2001, berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menjadi paradigma baru sistem pemerintahan di Indonesia yang berbeda dengan masa pemerintahan rezim Orde Baru.

Setelah sekian lama berjalan, Undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin mengukuhkan peran daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi. Dalam banyak hal, daerah mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk menentukan kebijakan serta alur penyelenggaraan layanan publik.

Tujuan utama penerapan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah diharapkan lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Bagi pemerintah daerah, otonomi adalah sebuah pengembalian harga diri. Otonomi akan semakin menyadarkan masyarakat daerah akan makna kedaulatan rakyat. Ini karena otonomi adalah adanya pengakuan atas keputusan-keputusan yang bersifat final pada suatu tingkatan dan ruang lingkup pemerintahan tertentu.

Mencermati kondisi tersebut, dibentuklah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada tahun 2000 untuk menjembatani kepentingan dan kebutuhan tingkat kota. Asosiasi ini berperan sebagai wadah pemersatu, fasilitasi, dan mediasi pemerintah kota dalam menata dan menyelenggarakan tata pemerintahan mereka.

Kedaulatan rakyat bukan sekedar hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dan adil dari pemerintah yang mereka pilih sendiri. Jika penyelenggaraan pemerintah selalu berangkat dari asumsi bahwa rakyat berhak atas pemerintahan yang baik, amanah, yang mampu memberikan pelayanan maksimal untuk memenuhi kebutuhan rakyat, pada titik inilah, otonomi daerah

mendapatkan tempatnya, karena hanya dengan itu, semua asumsi tersebut dapat diwujudkan.

Di samping itu, peran asosiasi yang harus dilaksanakan adalah fungsi fasilitasi dan mediasi. Fungsi ini mengindikasikan adanya suatu kontinuitas yang intensif dari tindakan komunikasi, atau dengan kata lain komunikasi merupakan kunci utama dari asosiasi ini, sebagaimana peran komunikasi pada bentuk organisasi lainnya. Dalam proses interaksinya secara berkelanjutan, pola komunikasi dari asosiasi ini akan terbentuk dikarenakan beberapa faktor yaitu ; 1) aturan atau pedoman dari distribusi peran anggota dari asosiasi tersebut; 2) intensitas atau kontinuitas komunikasi, baik formal maupun informal, maka ini melahirkan pola unik komunikasi di asosiasi ini.

Penerapan jaringan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemerintahan.

Pesatnya kemajuan telekomunikasi, media, dan informatika atau telematika, serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global

telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Dewasa ini agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi serta dapat menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat, diperlukan kerangka jaringan informasi dan komunikasi yang bersesuaian dengan semua departemen dan lembaga pemerintah, yang dalam sistem desentralisasi merupakan elemen penting untuk pencapaian otonomi daerah.

Luas dan banyaknya pemerintah kota di seluruh Indonesia yang hingga tahun 2012 berjumlah 98 buah, berdampak pada lebarnya jangkauan yang harus diakomodasi oleh APEKSI. Ini tentu bukan perkara mudah, karena setiap kota memiliki kebutuhan, kepentingan, karakteristik, serta kondisi berbeda. Untuk menghadapi variasi tersebut, maka dibentuklah enam komisariat yang membawahi daerah-daerah tertentu atau disebut dengan istilah regionalisasi. Khusus untuk kawasan Timur Indonesia, tergabung di dalam Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, atau yang dikenal dengan wilayah Sumapapua. Asosiasi ini merupakan pengejawantahan atau representasi dari bentuk kerja sama antar daerah sebagai perwujudan dalam membagi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu gagasan bersama mengenai suatu program yang strategis dalam meningkatkan pembangunan di masing-masing kota dari anggota. Apatah lagi dalam perspektif pembangunan di Indonesia Timur, akselerasi pembangunan di wilayah ini, dalam banyak aspek dikatakan masih tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia bagian Barat.

Dalam perspektif komunikasi kelompok atau organisasi, setiap kelompok atau organisasi memiliki struktur jaringan komunikasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari bagaimana organisasi tersebut mengkonstruksi organisasi tersebut. Pola komunikasi terbentuk atau yang dipilih, mengisyaratkan kebutuhan yang tepat dan dianggap sebagai yang efektif dalam membangun komunikasi di dalam kelompok dan organisasi tersebut. Dengan struktur yang ada, pesan dan arus informasi terdistribusikan antara orang (anggota) ke orang (anggota lain). Namun yang tak kalah pentingnya juga, adalah bentuk dari organisasi tersebut, karena bentuk ini juga mempengaruhi pola, sifat dan aliran informasi atau tindakan komunikasi antar anggota tersebut. Misalnya dalam kelompok yang hirarkis, maka pola komunikasi antara bawahan dengan atasan, bawahan dengan bawahan akan berbeda.

Di samping itu, yang akan menjadi aspek penting dari suatu organisasi adalah sistem informasi yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Sistem informasi berkontribusi dalam mengelola dan memproduksi suatu informasi yang nantinya dapat dijadikan acuan dari suatu organisasi atau kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian posisi suatu sistem informasi sangat penting. Sistem informasi setidaknya mengisyaratkan beberapa elemen yang mengkonstitusinya, seperti; sumber daya manusia, software, hardware, prosedur dan data. Namun Ladjamudin (2005) memformulasikan tiga bagian yakni; pertama, mesin (teknologi/media komunikasi), kedua, manusia, serta ketiga, data.

Sistem informasi itu sendiri bisa ditafsirkan sebagai kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (James Alter dalam Mulyanto 2009). Definisi tersebut dalam sudut pandang organisasi mengisyaratkan bahwa: 1) sistem informasi merupakan suatu prosedur yang ditetapkan oleh suatu organisasi dalam mengelola, memproses suatu data menjadi informasi yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan, baik pada tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi; 2) ini berkorelasi dengan bentuk dari teknologi informasi, dengan kata lain perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada bagaimana suatu informasi dikumpul, dirancang dan dibuat serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam mentransmisi pesan atau informasi dalam kegiatan komunikasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka APEKSI yang merupakan organisasi atau lembaga kerja sama adalah manifestasi dari beberapa walikota yang menjadi anggotanya. Dengan demikian, hal ini mengisyaratkan suatu representasi berbagai identitas dan kepentingan yang plural, karena masing-masing mewakili suatu kebutuhan yang urgen menurut daerah yang dipimpinnya, atau dengan kata lain merupakan seseorang yang mewakili suatu jabatan tertentu dari organisasi resmi lainnya. Namun sisi positifnya, keberadaan lembaga ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan *sharing* dan pencarian solusi dalam memecahkan suatu permasalahan.

Memahami organisasi APEKSI dalam perspektif komunikasi, baik dalam tinjauan sistem informasi dan jaringan komunikasinya, adalah pemahaman yang mengindikasikan akan suatu pola atau struktur komunikasi dan sistem informasi yang mungkin berbeda sebagaimana terjewantahkan dalam bentuk organisasi umumnya. Domain ini yang menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem informasi yang digunakan oleh APEKSI dalam menunjang peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia?
2. Bagaimana model dan proses jaringan komunikasi yang terstruktur dan diberdayakan dalam APEKSI untuk peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia?
3. Dimana kelebihan dan hambatan penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan oleh APEKSI untuk peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem informasi yang diimplementasikan oleh APEKSI dalam menunjang peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia.

2. Untuk mengetahui model dan proses jaringan komunikasi yang terstruktur dan diberdayakan dalam APEKSI untuk peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan hambatan penggunaan jaringan informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh APEKSI untuk peningkatan tata pemerintahan kota di Kawasan Timur Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu :
 1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi organisasi.
 2. Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai referensi dan sumber inspirasi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih mendalam tentang sistem informasi serta jaringan komunikasi pada suatu organisasi
2. Kegunaan secara praktis.

Kegunaan praktis, antara lain diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi anggota suatu organisasi terutama APEKSI dalam mengidentifikasi jaringan komunikasi dan sistem informasi dalam suatu organisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

Konseptualisasi sistem jaringan informasi dan komunikasi, membutuhkan beberapa langkah seperti; pemetaan secara konseptual sistem informasi dan komunikasi serta konsepsi pertautan antara informasi dengan komunikasi

1. Sistem Informasi

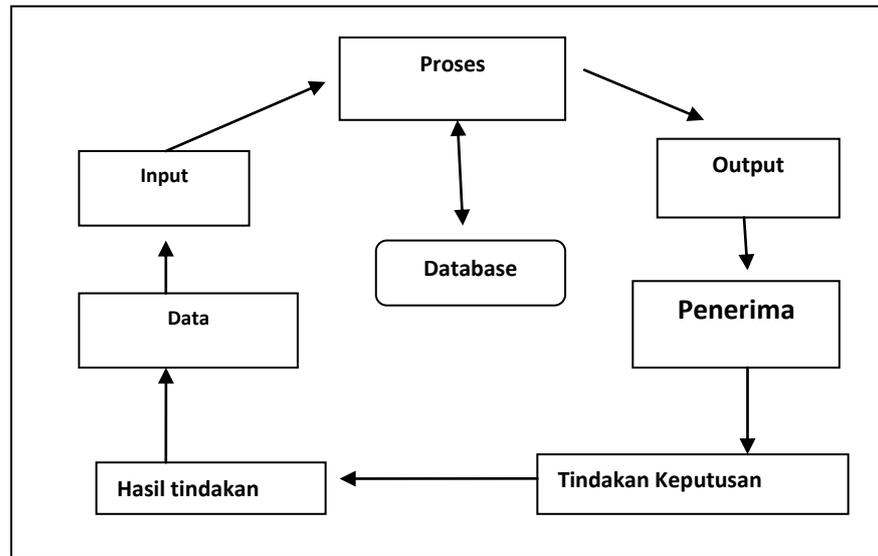
a. Perspektif Sistem Informasi

Menurut Mulyanto (2009) dalam bukunya *sistem informasi: konsep & Aplikasi* disebutkan bahwa sistem informasi tidak bisa dibedakan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi hanyalah bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi merupakan perkembangan teknologi komputer yang diadukan dengan teknologi komunikasi. Demikianlah, frasa sistem informasi terdiri dari kata sistem dan informasi

Sistem dapat diinterpretasikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan atau Menurut Jerry Fith Gerald (Mulyanto.2009: 2) merupakan suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan,

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sementara itu Jogiyanto (2009: 34-35) pemahaman akan sistem dapat dilihat dari dua pendekatan: 1). Pendekatan prosedur, yaitu suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu; 2). Pendekatan elemen, yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik, yaitu komponen atau elemen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, pengolah, keluaran, sasaran atau tujuan.

Demikian pula informasi, dimana secara definisi, informasi diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya (Raymond Mcleod dalam Ladjamudin 2005: 9). Informasi juga bisa ditafsirkan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (Mc Fadden dkk dalam Mulyanto, 2009:17). Informasi yang dihasilkan dari pengolahan suatu data oleh suatu sistem, dapat menjadi sebuah data untuk sistem lain. Menurut Burch dan Grudnitski (Mulyanto, 2009), suatu informasi terkait dengan prosesnya memiliki siklus informasi, dimana dengan menggambarkan pengolahan data menjadi informasi, kemudian informasi tersebut digunakan sebagai pengambil keputusan, sehingga dari pengambilan keputusan tersebut dihasilkan data kembali. Di bawah ini mengilustrasikan bagaimana siklus dari suatu informasi



Gambar 1. Siklus informasi

Kualitas informasi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh; pertama, relevan yakni seberapa jauh tingkat relevansi informasi tersebut dengan kenyataan kejadian masa lalu, kejadian hari ini dan kejadian yang akan datang; kedua, akurat, yakni suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan; ketiga, tepat waktu, yakni berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu; keempat, ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai nilai jual tinggi, serta biaya operasional untuk

menghasilkan informasi tersebut minimal; kelima, efisien, yakni memiliki sintak dan kalimat yang jelas dan sederhana, namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam; keenam, dapat dipercaya, yaitu informasi tersebut berasal dari orang yang dipercaya (Ladjamudin 2005. 11-12)

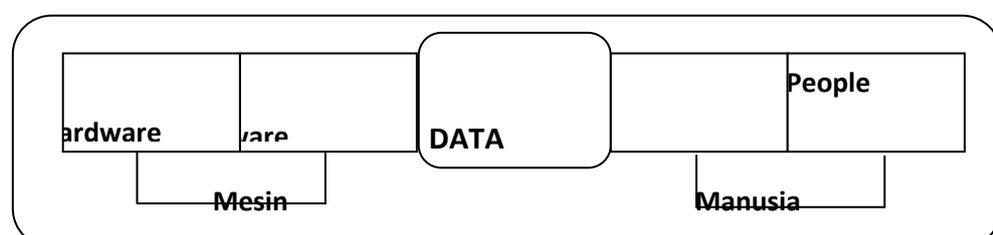
Sementara itu, suatu informasi bagi manusia secara individual atau dalam berorganisasi memiliki posisi sangat penting dalam menentukan arus perkembangan kemajuannya seperti misalnya di dalam buku *Managing Information: Core management*, Diana Bedward & John Stredwick (2004: 265-266) menyebutkan bahwa informasi setidaknya memiliki manfaat atau tujuan dalam: 1) *It advances the understanding of complex situations atau pemahaman terkini terkait dengan situasi yang kompleks;* 2) *It provides signs of trouble atau sebagai pemberi sinyal terkait suatu masalah;* 3) *It helps to provide solutions by reducing the degree of uncertainty atau menawarkan suatu solusi dengan meminimalisir derajat ketidakpastian ;* 4) *It maintains the historical evidence atau menyimpan arsip data informasi lama (sebagai document);* 5) *It acts as the great communicator bertindak seperti komunikator.*

Berdasarkan pemetaan istilah tersebut maka menurut James Alter (Mulyanto, 2009; 28) sistem informasi merupakan kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Bodnar dan Hopwood (1993) mengatakan sistem informasi sebagai kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang

dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sistem informasi juga merupakan suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai (gelian, oram dan Waggin dalam Mulyanto, 2009:28).

Sementara itu menurut Ladjamudin (2005: 13-14), sistem informasi dapat didefinisikan sebagai: 1), suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi; 2), sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau mengendalikan organisasi; 3),suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Dalam suatu sistem informasi, keberadaan komponen-komponen memiliki peranan penting dalam eksistensi dari sistem tersebut. Komponen ini mengacu pada sumber daya yang menyokong keberadaan dari suatu sistem informasi, adapun komponen sistem informasi sebagai berikut (Mulyanto, 2009; 31-34)



Gambar 2. Lima komponen sistem informasi

1. **Sumber daya manusia**, yaitu manusia mengambil peranan yang penting bagi sistem informasi. Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengguna akhir dan pakar sistem informasi
2. **Sumber daya hardware** atau semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Sumber daya hardware tidak hanya sebatas komputer saja, melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetika atau optikal
3. **Sumber daya software** atau semua rangkaian perintah (instruksi) yang digunakan untuk memproses informasi. Sumber daya software tidak berupa program saja, tetapi berupa prosedur. Program merupakan sekumpulan instruksi untuk pemrosesan informasi. Sedangkan prosedur adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan pemrosesan informasi dan mengoperasikan perintah bagi orang-orang yang akan menggunakan informasi
4. **Sumber daya data**. Dimana sumber daya data atau bukan hanya sekedar bahan baku untuk masukan sebuah sistem informasi, melainkan sebagai dasar membentuk sumber daya organisasi. Data bisa berupa teks, gambar, audio dan video

5. **Sumber daya jaringan.** Merupakan media komunikasi yang menghubungkan komputer, pemroses komunikasi dan peralatan lainnya, serta dikendalikan melalui software komunikasi. Sumber daya jaringan berupa media komunikasi seperti kabel, satelit, seluler dan dukungan jaringan seperti modem, software pengendali, serta prosesor antar jaringan

Komponen-komponen tersebut digunakan oleh sistem informasi untuk menjalankan aktifitas input, pemrosesan, output, penyimpanan dan pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Sistem informasi itu sendiri memiliki beberapa aktifitas yaitu input, proses, output penyimpanan dan pengendalian.

b. Informasi dan Komunikasi dalam Bingkai TIK

Tidak dinafikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah atau memperkaya konfigurasi dari pola komunikasi dan informasi. Dalam informasi misalnya, dikenal istilah teknologi informasi yang inheren dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya memahami bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akan memberi gambaran bagaimana informasi diolah dan ditransmisikan. Demikian pula memberi pemahaman bagaimana komunikasi terjadi dalam media yang serba canggih ini. Roger (1986) mendefinisikan teknologi sebagai sebuah desain untuk tindakan instrumental dalam rangka mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat yang tercakup

didalamnya suatu hasil yang diinginkan. Sebuah teknologi terdiri aspek perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang meliputi informasi mendasar untuk perangkat keras.

Teknologi informasi menurut Martin (dalam Mulyanto. 2009: 44) tidak hanya sebatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk pengiriman informasi.

Di tempat lain, Nur Sadik (2003) menyatakan Information Technology (IT) adalah suatu modal strategy yang dapat di gunakan dalam tiga hal:

1. Melihat kedalam untuk mendesign ulang proses business untuk meningkatkan daya saing.
2. Melihat keluar untuk memasukkan product dan pelayanan.
3. Melihat di belahan lain untuk disambungkan dengan organisasi yang lain.

Sementara itu, Castell (dalam Littlejohn, 2009 ; 682) mengidentifikasi lima gambaran utama dari paradigma teknologi informasi; (1) *information is the raw material of new forms of production and consumption*, (2) *digital information is all pervasive* (3) *the logic of digital information affects society* (4) *flexibility is a fundamental part of what information enables*, and (5) *networks information tends to converge into highly integrated systems*.

Dengan demikian isu sentral dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perkembangan komputer dan internet (jaringan). Komputer misalnya merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan terorganisasi agar secara otomatis menerima dan menyimpan input, memproses dan menghasilkan output dibawah dari instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori.

Definisi lain tentang teknologi informasi dan komunikasi dikemukakan oleh Syling Wen (Bungin, 2009: 121-124) mengatakan bahwa jenis-jenis media penyimpanan (informasi) dan media transmisi adalah:

1. Buku dan kertas. Buku menjadi media penyimpanan teks dan grafis yang paling lama umurnya. Buku dan kertas menjadi peninggalan umat manusia yang sangat penting. Bangsa Tionghoa merupakan penemu media penyimpanan yang sempurna dalam sejarah manusia yang terjadi pada 3000 tahun yang lalu.
2. Kamera fotografi pertama yang mengekspos gambar. Temuan spektakuler ini kemudian disempurnakan pada revolusi industri dengan rekayasa mekanis dan optik.
3. Alat perekam kaset, berawal dari temuan Thomas Alva Edison mengenai phonograph yang kemudian berkembang dalam masyarakat sebagai media penyimpanan berbagai suara dan musik dalam bentuk kaset rekaman.

4. Kamera film proyektor, yaitu adanya persistensi penglihatan manusia serta penemuan kamera, penggulung serta proyektor, animasi dan film dapat dihasilkan.
5. Pita perekam video atau alat / media yang digunakan oleh pertelevisian dalam merekam suatu kejadian yang ditayangkan /secara langsung, sehingga dapat diputar di kemudian hari.
6. Disk optikal, teknologi penyimpanan lainnya yang berkembang dengan menggunakan teknologi optikal, seperti disk video, VCD, CD foto, DVD dan CD interaktif
7. Disket dan *harddisk*, jenis teknologi yang hampir sama dengan kegunaan sebagai media penyimpanan. Disket dan harddisk menggunakan teknologi optikal dengan bahan yang berbeda. Disket diproduksi dengan plastik sedangkan harddisk dibuat dari logam dengan mengandalkan jarum baca menggantikan fungsi optik
8. *Flashdisk*, merupakan teknologi elektrik penyimpanan data dengan mengandalkan chip untuk menyimpan, membaca, dan menulis data maupun gambar

Sementara itu, media transmisi bukanlah sekedar tentang penyimpanan serta penyebaran. Kita juga menginginkan informasi ditransmisikan seketika sebelum berita ketinggalan. Demikianlah, selain media penyimpan, kita butuh transmisi seketika. Menurut Bungin (2009: 124-140) transmisi media dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Komunikasi, dimana pada dasarnya adalah transmisi dari satu ke satu orang, pengirim maupun penerimanya spesifik. Komunikasi ini adalah bentuk transmisi paling klasik dalam sejarah umat manusia. Perkembangan pengetahuan dan teknologi mengubah jenis dan media transmisi yang semula bersifat tradisional. Berbagai jenis transmisi diantaranya;
 - a. *Komunikasi pos kuda*, atau transmisi pesan yang dikenal di zaman kuno dimana pesan dikirim oleh penunggang kuda
 - b. *Telegraph dan telephon*, telegraph berawal dari penemuan kode morse yang ditransmisikan dalam telegraph atau penggunaan sirkuit terbuka dan tertutup untuk mewakili tanda nol dan satu. Sementara itu, telephon merupakan transmisi suara berjarak yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, dimana dalam perkembangannya telephon mampu mentransmisikan suara dengan jarak yang jauh.
 - c. *Pesawat pager dan SMS*, atau proses dimana seseorang mengirim pesan kepada orang lain yang memiliki alat (pager atau telepon seluler) dengan melalui operator yang kemudian meneruskan ke penerima tersebut.
 - d. *Surat elektronik (e-mail)*, merupakan perkembangan dari teknologi internet menciptakan berbagai diversifikasi teknologi transmisi, antara lain e-mail. Lewat email, pesan atau informasi dapat ditransfer secara cepat ke berbagai tempat di dunia

e. *Telepon video dan telepon bergerak*, perkembangan teknologi atau (yang dikenal dengan 3G) yang signifikan mengubah peran dan fungsi telepon seluler. Telepon seluler tidak hanya sekedar menjadi teknologi komunikasi, namun menjadi multimedia yang menyediakan segala macam kebutuhan baik sebagai media penyimpanan, media *processing* maupun sebagai media penyiaran yang dapat secara real time berfungsi sebagai media transmisi.

2. Penyiaran, yaitu transmisi dari satu orang ke banyak orang. Media penyiaran yang digunakan manusia mencakup teriakan, atau pengumuman, tabuhan drum, surat kabar, majalah, radio, televisi (nirkabel, kabel atau satelit, telepon seluler dan internet).

a. *Surat kabar dan majalah, pamflet, brosur*, yaitu merupakan kelanjutan dari teknologi teks dan grafis yang sudah ditemukan. Media ini hanya mentransmisikan informasi berupa teks dan grafis. Sebagai media transmisi, surat kabar dan majalah cukup mampu mentransmisikan informasi dari sumber berita ke khayalak dalam waktu cepat.

b. *Radio*, yaitu media yang hanya mentransmisikan suara. Radio juga memiliki kemampuan mengirim transmisi dengan jangkauan yang sangat luas sehingga menjangkau daerah pedesaan maupun lautan yang jauh.

c. *Televisi baik analog maupun digital*, dimana ini merupakan media yang mentransmisikan gambar, suara dan grafis. TV juga memanfaatkan

teknologi satelit, internet maupun kabel, sehingga memungkinkan orang dapat menyaksikan siarannya dimana dan kapan saja.

- d. *Telepon seluler* yang dalam generasi ketiga (3G) telah memiliki fitur dan kemampuan yang kompleks dan canggih. Seluler kini bukan hanya sekedar telepon (transmisi suara), namun juga menjadi fashion dengan berbagai varian multimedia dengan berbagai konvergensi, seperti telepon, televisi, radio, DVD, MP3, MP4, media *point to point* menggunakan infra merah, *Bluetooth*, *edge* dan sebagainya
- e. *Blackberry*, meskipun sama dengan seluler, blackberry adalah generasi baru dari seluler yang lebih progresif mengadopsi internet atau memiliki kemampuan mengakses internet seperti monitor komputer sehingga memudahkan aktifitas seluler. Di samping itu, blackberry memiliki konektifitas langsung, *point to point* antar blackberry.

3. *Jaringan*. Merupakan transmisi dari banyak orang ke banyak orang, tetapi mencakup transmisi dari satu orang ke satu orang dan dari satu orang ke banyak orang. Sejauh ini jaringan yang digunakan banyak orang adalah internet.

- a. *Internet*. Merupakan bentuk konvergensi dari berbagai teknologi penting terdahulu seperti komputer, televisi, radio dan telepon. Internet atau *international network* merupakan rangkaian jaringan terbesar di dunia, dimana semua jaringan yang berada pada semua organisasi dihubungkan dengan suatu jaringan terbesar sehingga

dapat saling berkomunikasi. Dalam jaringan tersebut mungkin melibatkan LAN (local area networking), MAN (metropolit area network) dan WAN (wide area networking) (Mulyanto, 2009: 113).

Setelah penemuan komputer pada tahun 1960-an dan terus berkembang sampai tahun 1990-an hingga melahirkan teknologi internet. Internet begitu memukau dan begitu cepat berkembang dengan variasi programnya yang menjadikan bumi ini dalam cengkeraman teknologi. Internet telah berkembang menjadi teknologi yang tidak saja mampu mentransmisikan berbagi informasi, namun juga telah mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia virtual.

Menurut Sayling Wen (Bungin 2009, 137) sekarang ini yang terpenting dan paling luas adalah internet, yang menghubungkan komputer-komputer pribadi yang paling sederhana hingga komputer-komputer super yang paling canggih. Layanan yang diberikan internet mencakup e-mail, netnews, telnet, file transfer protocol (FTP) dan world wide web (www), dimana paling banyak digunakan adalah e-mail dan www.

Kekuatan internet, bukan sekedar pada kecanggihan hardware tetapi juga pada kerumitan software-nya. Aplikasi software komunikasi dan kolaborasi koneksi digunakan untuk mendukung komunikasi, koordinasi dan kolaborasi jaringan yang ada adalah *cybercommunity*. Contoh aplikasi dalam internet (Kadir dalam Bungin, 2009; 138-40)

yaitu surat elektronik, surat suara (*voice mail*), forum diskusi, sistem percakapan tertulis (*chat*), konferensi suara, konferensi video dan sistem pertemuan elektronis.

Selain aplikasi tersebut, dalam internet berkembang berbagai program lain yang intinya menjadi aplikasi komunikasi antar sesama masyarakat maya.

1. *Teknologi web* dimana internet dioperasikan antara lain melalui aplikasi web. Sehingga seseorang memiliki sebuah ruang dalam dunia maya. Dengan memiliki web, maka seseorang memiliki alamat di internet.
2. *E-commerce, e-government dan semacamnya*, dimana suatu fitur dalam internet untuk menciptakan suatu layanan secara online, baik dalam perdagangan maupun layanan lainnya.
3. *Blog*, merupakan ruang dalam intrnet yang dimiliki seseorang yang mempunyai fasilitas untuk memproduksi sesuatu (tulisan misalnya) dan dapat diakses oleh orang lain. Blog merupakan identitas seseorang dalam internet.
4. *Facebook* atau fitur dalam internet untuk menciptakan kelompok sosial dalam internet. Facebook juga memungkinkan orang untuk mengapresiasi dirinya serta melakukan komunikasi antar sesama pengguna facebook.

- b. Internet ber-*bandwidth* lebar dan layanan-layanan video atas permintaan (video on demand atau VOD) dimana sebagai perkembangan dari internet yang pada awalnya hanya mentransmisikan lima jenis media. Media ini memungkinkan internet untuk mentransmisikan video yang memerlukan bandwidth yang sangat besar.
- c. *Radio, Koran dan televisi Online* yaitu penggunaan internet untuk melakukan konvergensi fungsi dan bentuk dari media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Dengan demikian, seseorang dapat mengakses secara online media berupa surat kabar, majalah dan televisi.

Di era globalisasi ini, peran komunikasi dan informasi begitu penting dalam kehidupan manusia. Suatu berita mengenai sebuah kejadian di belahan bumi bagian utara dapat dengan cepat sampai kepada masyarakat di bumi bagian selatan. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan suatu era yang disebut globalisasi..

Dalam penyampaian informasi dan proses komunikasi tersebut, terdapat suatu peran penting yang terjadi melalui beberapa media. Seperti telepon, radio, televisi, hingga internet. Akan tetapi ada suatu alat yang dapat merangkum keseluruhannya sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat diberbagai belahan bumi secara singkat. Perangkat tersebut ialah satelit.

Satelit mempunyai sifat yang universal, dengan banyak kelenturan dalam aplikasinya, efisien dalam biaya, dan mampu menjawab dalam berbagai masalah antara lain;

1. Komunikasi data maupun suara tanpa kabel
2. Menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain
3. Menjawab kebutuhan akan transaksi finansial
4. Merupakan sarana untuk hubungan internet
5. Melakukan informasi video dan jaringan

Satelit komunikasi pada hakekatnya merupakan stasiun relay yang ditempatkan di atas Bumi dengan tujuan untuk menerima, memperkuat, dan meneruskan sinyal analog yang ia terima dan mengubahnya menjadi sinyal digital maupun frekuensi radio.

Salah satu aplikasi satelit adalah pemanfaatannya sebagai salah satu sarana komunikasi. Satelit komunikasi mempunyai banyak keuntungan dibanding dengan sistem komunikasi terestrial. Paling tidak ada 7 keunggulan satelit komunikasi dibanding dengan komunikasi terestrial. Keunggulan tersebut antara lain;

1. Universal, artinya satelit komunikasi dapat digunakan dimana saja.
Sebuah satelit paling tidak mampu merangkum $\frac{1}{3}$ luas permukaan

Bumi. Selain itu biaya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dari biaya yang digunakan pada sistem komunikasi

2. Terrestrial. Dengan konstelasi tiga satelit yang ditempatkan pada ketinggian tertentu maka seluruh permukaan Bumi dapat di jangkau
3. Versatile,serba guna melalukan informasi dalam beragam bentuk, data, video, suara ataupun aplikasi multimedia lainnya dari sarana hiburan, sampai ke jaringan selular dan warta berita.
4. Seamless, sempurna. Satelit sebagai media penyiaran membuat komunikasi terdistribusi secara simultan dan ideal dari sumbernya ke ribuan lokasi dalam tempo dan waktu yang bersamaan(real time)
5. Fast,cepat tidak seperti komunikasi terrestrial yang lambat dan mahal. Jaringan satelit dapat menghubungkan kota, daerah dan tempat yang terisolir, melintasi daerah dimana penggunaan kabel tembaga dan serat optik menjadi mahal. Jaringan satelit dapat di set-up dengan cepat dalam melayani kebutuhan pasar
6. Expandable,dapat diperluas skala jangkauannya termasuk juga kebutuhan akan lebar pita (bandwith), selain itu kebutuhan pengguna dapat dikoordinasikan dengan penjual dan pengembangdibandingkan dengan jaringan konvensional yang membutuhkan terminal baru yang tentu saja akan memerlukan biaya tambahan
7. Flexible,satelit dengan mudah bisa diintegrasikan dengan cara melengkapi, menambah maupun memperluas jaringan komunikasi.

Memberikan solusi atas keterbatasan infrastruktur maupun geografi yang sering ditemukan dalam komunikasi terrestrial

2. Komunikasi Organisasi

a. Komunikasi dan organisasi

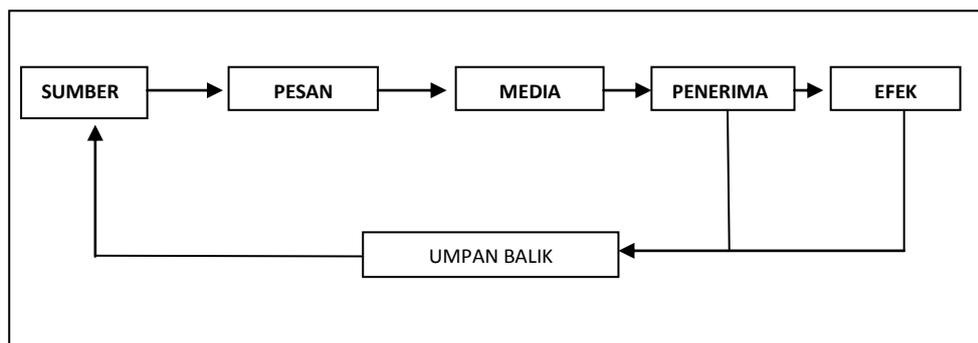
Sebelum menganalisis secara teoritis mengenai komunikasi organisasi, pertama yang harus dipahami adalah komunikasi itu sendiri. Ini karena komunikasi organisasi adalah bentuk komunikasi yang memiliki struktur, pola dan bentuk yang berbeda.

Dalam Cangara (1998: 16), Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, “*comunis*”, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya “*communis*” adalah “*communico*” yang artinya berbagi. Berbagai pakar mencoba mendefinisikan komunikasi (Cangara. 1998:18-17), diantaranya sebagai berikut;

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku (Book. 1980)

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Rogers dan Lawrence Kincaid. 1981)

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima dan efek. Unsur-unsur tersebut bisa disebut komponen atau elemen komunikasi. Adapun unsur-unsur komunikasi sebagai berikut (Cangara, 1998: 23-25)



Gambar 3, unsur-unsur komunikasi

1. Sumber, dimana semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga.

2. Pesan, dimana dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi.
3. Media, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media bisa berupa alat indra atau saluran komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi pribadi. Dalam media massa media dibagi menjadi dua yakni media cetak dan elektronik
4. Penerima, adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai atau negara. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi
5. Pengaruh atau efek, yakni berupa perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.
6. Tanggap balik, dapat disebut juga salah bentuk pengaruh yang berasal dari penerima. Namun tanggapan balik bukan hanya berasal dari pesan tersebut, bisa berasal dari unsur lain.
7. Lingkungan, merupakan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu.

Dalam buku "*Pengantar Ilmu Komunikasi*", Soyomukti (2011 178-183) Organisasi adalah bentuk kelompok karena di dalamnya ada orang yang berkumpul. Organisasi didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu heirarki/jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Istilah "organisasi" berasal dari bahasa Latin *organizare*, yang secara harfiah berarti 'paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung'. Di antara para ahli, ada yang menyebut paduan itu sebagai "sistem", ada juga yang menamakannya "sarana".

Dari batasan tersebut, dapat digambarkan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur dasar yang membentuk suatu keberadaannya antara lain:

1. Anggota organisasi, yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaan organisasi, membentuk organisasi, serta terlibat dalam beberapa kegiatan pokok. Orang-orang itu juga terlibat dalam kegiatan pemikiran-pemikiran yang meliputi konsep-konsep, penggunaan bahasa, pemecahan masalah, dan pembentukan gagasan. Mereka juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan perasaan yang mencakup emosi, keinginan, dan aspek-aspek perilaku manusia lainnya yang bukan aspek intelektual. Mereka juga terlibat dalam kegiatan *self-moving* (mencakup kegiatan fisik) dan pekerjaan teknis;

2. Pekerjaan dalam organisasi, yang terdiri dari tugas-tugas formal dan tugas-tugas informal. Tugas-tugas ini menghasilkan produk dan memberikan pelayanan organisasi. Pembagian kerja dan tugas merupakan bagian penting dalam organisasi;
3. Praktik-praktik pengelolaan (*management*), yaitu bahwa tujuan primer pegawai manajerial adalah menyelesaikan pekerjaan melalui usaha orang lainnya. Manajer membuat keputusan mengenai bagaimana orang-orang lainnya, biasanya bawahan mereka menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Sebagian manajer membawahi para pekerja yang beroperasi dan sebagian lainnya membawahi manajer-manajer lainnya;
4. Struktur organisasi, yaitu merujuk kepada hubungan-hubungan antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi. Struktur organisasi ditentukan oleh variabel kunci: kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi; serta
5. Pedoman organisasi, yaitu serangkaian pernyataan yang memengaruhi, mengendalikan, dan memberi arahan bagi anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Pedoman organisasi terdiri atas pernyataan-pernyataan, seperti cita-cita, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, dan aturan.

b. Fungsi komunikasi organisasi

Menurut Pace dan Faules (2009: 31) komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. DeVito (1997: 340) mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik No. 28 tahun 2011 dinyatakan bahwa Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun non formal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah di dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah.

Tidak ada yang meragukan bahwa proses komunikasi organisasi tergantung pada jaringan komunikasi (*communication network*) yang dibuatnya. Jaringan komunikasi merupakan struktur hubungan antar individu, bagian-bagian (*divisions, units*) dan kelompok (*clique*) dalam suatu organisasi yang menunjukkan struktur kekuasaan, kekuatan, pengaruh, kewenangan, dan otoritas dalam organisasi. Fungsi penting komunikasi organisasi, menurut Brent D. RaRuben (Soyomukti: 2010:180-181), antara lain:

1. Mengkoordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit-unit lain dalam organisasi;
2. Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan;

3. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi; dan
4. Menjamin adanya arus timbal balik (*two-way flow information*) antara organisasi dan lingkungan eksternal (luar) organisasi

Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung, baik formal maupun nonformal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang disepakati secara resmi oleh organisasi yang sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, melainkan lebih kepada anggota organisasi secara individual.

Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi informatif: organisasi merupakan suatu sistem pemrosesan informasi, tempat seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tatanan manajemen (para manajer, konseptor, dan lain-lain) membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi (*decision making*) dan untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi (*conflict management*). Sedangkan, karyawan (bawahan)

membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya;

2. Fungsi regulatif: fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang sangat berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu: berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Begitu pula memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur sebuah organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka, tugas pemimpin adalah untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan jika pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya;
4. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan

perkerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu: saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (buletin, surat kabar) dan laporan kemajuan organisasi; dan saluran komunikasi informal, seperti pembicaraan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan membutuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

Komunikasi juga berkaitan dengan kontrol terhadap organisasi. Persoalan ini menjadi perhatian dalam komunikasi organisasi, terutama berkenaan dengan pertanyaan bagaimana organisasi dikembangkan atau diarahkan. Dengan menggunakan pendekatan manajemen, dapat diketahui bahwa organisasi memiliki mekanisme-mekanisme tertentu dalam melakukan perencanaan (*planning*), pengambilan keputusan (*decision making*), kontrol (*controlling*), pengawasan (*monitoring*), koordinasi (*coordinating*), dan evaluasi (*evaluating*).

Selain itu, juga harus dilihat terjadinya suatu proses dinamis ketika pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam suatu organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada organisasi-organisasi, bagaimana pola-pola

distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi.

c. Aliran informasi dalam organisasi

Dalam komunikasi organisasi, ini berarti membicarakan tentang informasi yang berpindah secara formal dari seseorang dalam struktur organisasi. Setidaknya ada empat aliran formal informasi dalam organisasi, yaitu (Pace dan Fausel. 2009: 183-198):

- 1.) *Komunikasi ke bawah.* Dimana dalam sebuah organisasi bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang lebih rendah. Jenis informasi ini berupa; informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan; mengenai dasar pemikiran melakukan pekerjaan; informasi mengenai kebijakan dan praktik organisasi; mengenai kinerja pegawai dan; informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.
- 2.) *Komunikasi ke atas.* Informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Pentingnya komunikasi ke atas karena: berharga untuk membuat keputusan; mendorong munculnya omelan, keluhan sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu paling dekat dengan operasi-operasi sebenarnya.: memberitahu ke penyelia kapan bawahan siap menerima informasi; menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada organisasi, dan; membantu pegawai mengatasi masalah mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaan.

3.) *Komunikasi horizontal.* Terdiri dari penyampaian informasi diantara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Komunikasi horizontal muncul karena berbagai alasan, seperti; untuk mengkoordinasikan penugasan kerja; berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan; untuk memecahkan masalah; untuk memperoleh pemahaman bersama; untuk mendamaikan, berunding dan menengahi perbedaan, dan; untuk menumbuhkan dukungan personal.

4.) *Komunikasi lintas saluran.* Dalam kebanyakan organisasi muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan mereka. Special staf biasanya yang paling aktif dalam komunikasi lintas-saluran karena tanggung jawab mereka muncul di beberapa rantai otoritas perintah dan jaringan yang berhubungan dengan jabatan.

Sementara Arus komunikasi organisasi di atas dapat dilaksanakan dengan tiga cara: a). penyebaran pesan secara serentak, yaitu apabila semua anggota organisasi menerima suatu informasi dalam waktu yang bersamaan; b). penyebaran pesan secara berurutan, yaitu apabila anggota organisasi menerima suatu informasi berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya; c). penyebaran pesan secara kombinasi, yaitu apabila anggota organisasi menerima suatu informasi dalam waktu

bersamaan, serta menjalankan pula penyampaian informasi tersebut berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Aliran komunikasi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Lancar tidaknya aliran komunikasi organisasi ditentukan oleh iklim komunikasi.

Iklim komunikasi merupakan suatu citra makro, abstrak, dan gabungan suatu fenomena global yang disebut “komunikasi organisasi”. Iklim komunikasi diasumsikan berkembang dari interaksi antara sifat-sifat suatu organisasi dan persepsi individu atas sifat-sifat itu. Iklim dipandang sebagai suatu kualitas pengalaman subjektif yang berasal dari persepsi atas karakter-karakter yang relatif langgeng pada organisasi.

Iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, disepakati, dikembangkan, dan dilakukan secara berkesinambungan dengan anggota organisasi lainnya. Pengaruh ini menghasilkan pedoman bagi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan individu, serta memengaruhi pesan-pesan mengenai organisasi.

Urgensi sistem informasi dalam iklim organisasi secara ringkas dikemukakan oleh Dainty (2006: 192) bahwa *information systems are essential for organisations to survive and prosper, as they provide the capacity for firms to*

offer new products and services, operate in remote locations and develop the ways in which they do business. Sistem informasi memegang peranan penting bagi banyak organisasi untuk bertahan dan menjadi sejahtera. Hal ini dikarenakan dengan sistem yang ada akan memudahkan sebuah perusahaan atau organisasi lain misalnya untuk menawarkan jasa dan pelayanan.

3. Good Governance

Menurut Bappenas (2003) proses pemahaman umum mengenai *governance* atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroiti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.

Good Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Perlu diingat bahwa untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada. UNDP dalam artikel Bappenas merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu: legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya

pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia / MTI (Siregar, 2008) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang diperlukan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi

terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.

6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung-jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga, *Good Governance* yang efektif menuntut adanya

koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta.

4. Otonomi Daerah dan Kerjasama antar pemerintahan (Intergovernmental network)

Dua hal pokok yang merupakan puncak dari pelaksanaan otonomi daerah adalah redistribusi kewenangan di bidang pemerintahan (politik) dan fiskal (ekonomi). Kedua persoalan itu dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Menurut UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom dan tidak dirangkap dalam wilayah administrasi. Kepala daerah sejatinya menjadi pemerintah daerah dan tidak lagi merangkap sebagai perpanjangan kekuasaan dari pusat. Hal ini mensyaratkan daerah diberikan kewenangan yang luas dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya ekonomi lokal.

Pada saat yang bersamaan pihak legislatif juga diberikan peran yang luas dalam menjalankan kewenangannya terutama di bidang legislasi, penganggaran dan kontrol. Makin luasnya kewenangan diberikan kepada daerah diharapkan efektifitas pemerintahan dan pembangunan berjalan optimal. Adapun tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai dalam desentralisasi

terkait dengan tujuan-tujuan ekonomis dan politik. Desentralisasi secara ekonomis dianggap mampu meningkatkan efisiensi, dengan demikian, berdampak pada pengurangan ekonomi biaya tinggi dan peningkatan sumber daya manusia lebih berdaya efektif. Sedangkan secara politis, desentralisasi bertujuan memperkuat demokrasi di tingkat pemerintah, serta memperkuat integrasi nasional (Sangadji dkk.-)

Desentralisasi dan Otonomi Daerah masih menyisakan sejumlah permasalahan. Tambahan kewenangan dan tanggung jawab baru, perubahan pola struktur dan pola hubungan antar institusi, tuntutan pembaruan dari masyarakat yang kian menguat; semua ini harus ditangani oleh pemerintah-pemerintah daerah di tengah minimnya kapasitas dan sumber daya internal serta keadaan sosial ekonomi yang belum juga membaik. Karena pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia menghadapi masalah-masalah yang relatif sama, kerjasama antar pemerintah daerah tentunya akan sangat membantu dalam mencari pemecahan dan mengatasi secara bersama masalah-masalah tersebut.

Menyikapi permasalahan di atas, pemerintah bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP) menginisiasi terbentuknya kerjasama antar daerah di kawasan Timur Indonesia melalui dukungan program *Local Governance Reform trough Inter-Governmental Cooperation* (LOGIC). ,program LOGIC atau Pembaruan Tata pemerintahan Daerah melalui Kerjasama antar Pemerintah dikembangkan dengan tujuan untuk

meningkatkan kemampuan kelembagaan tata pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan desentralisasi dan otonomi daerah. Program ini juga bertujuan untuk membangun wadah dan jaringan bagi pemerintah-pemerintah daerah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka semakin meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dan menyediakan pelayanan pada masyarakat.

Program LOGIC berangkat dari pemberdayaan asosiasi-asosiasi pemerintah kota, baik Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) maupun Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), agar kedua institusi ini mampu mewakili kepentingan-kepentingan para anggota mereka dengan efektif di tingkat nasional, dan pada saat yang sama menyediakan pelayanan kolektif maupun individual untuk masing-masing anggota di tingkat daerah. Dengan menyatukan suara di bawah asosiasi-asosiasi ini, pemerintah-pemerintah daerah akan dapat meningkatkan posisi tawar-menawar mereka dengan pemerintah di tingkat nasional

Menurut Susilo Bambang Yudoyono (dalam Laporan akhir kerja sama antar daerah oleh APEKSI) kerja sama bermanfaat bagi daerah karena:

- a. *Sharing of Experience*. Dengan kerjasama, maka daerah akan dapat berbagi pengalaman dengan daerah lain sehingga suatu daerah tak perlu mengalami apa yang mungkin menjadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh daerah lain.

- b. *Sharing of Benefits*. Dengan kerja sama, maka daerah dapat saling berbagi keuntungan. Pengelolaan bersama pada potensi daerah akan menghasilkan keuntungan dan manfaat dirasakan bersama sehingga daerah dapat merasakan manfaat secara adil dari pengelolaan yang dilakukan.
- c. *Sharing of Burden*. Dengan kerja sama, maka daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proporsional dan tidak ada daerah yang terbebani.

Kerja sama daerah dalam kerangka integovernmental network juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi atau sumber daya yang ada di masing-masing daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama. Selain itu, kerjasama daerah seperti ini juga sejalan dengan prinsip governance karena menghubungkan masyarakat dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan.

Terdapat beberapa perwujudan dari intergovernmental networks pada tingkat daerah. Pertama adalah *information network*, pada masalah ini daerah dapat membuat forum berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi dan solusi potensial atas masalah-masalah bersama. Kedua, *developmental network*, bukan hanya pertukaran informasi, tapi juga dikombinasikan dengan pendidikan dan pelayanan secara langsung dengan

meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan solusi atas masing-masing persoalan. Ketiga, *outreach network*, dimana kerja sama semakin solid karena program strategi untuk masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan di lain daerah. Keempat, adalah *action network* yang merupakan kerja sama yang paling solid, dimana daerah secara bersama-sama membuat serangkaian program aksi bersama yang dijalankan oleh masing-masing daerah sesuai dengan proporsi dan kemampuannya masing-masing.

Secara lebih spesifik, tentang alternatif format kelembagaan kerja sama antar daerah dapat dirumuskan sebagai berikut (Pratikno dalam Laporan akhir kerjasama antar daerah oleh APEKSI):

- a. **Lembaga Kerjasama.** Forum ini hampir sama dengan forum koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk merumuskan, mengkoordinasikan rencana dan kegiatan dalam sektor-sektor yang dikerjasamakan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan tersebut. yang membedakannya dengan forum koordinasi, monitoring dan evaluasi adalah kekuatan pengikat. Kalau forum koordinasi, monitoring dan evaluasi lebih mengandalkan pada adanya informasi dan toleransi antar pihak yang bekerjasama, maka pada lembaga kerjasama ini cakupannya juga samapai pada adanya sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan dalam lembaga kerja sama ini. Dengan kata lain, lembaga kerja sama ini

memiliki kapasitas regulatif dan memaksa dibandingkan dengan forum koordinasi, monitoring dan evaluasi.

- b. **Forum Koordinasi.** Merupakan forum yang mengkordinasikan dan mengkomunikasikan rencana dan kegiatan dalam sektor-sektor yang dikerjasamakan. Cakupan kerjasama menyangkut koordinasi teknis pelaksana dan koordinasi penganggaran.
- c. **Forum koordinasi, monitoring dan evaluasi.** Sebuah forum yang berperan merumuskan, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana dan kegiatan dalam sektor-sektor yang dikerjasamakan dan melakukan **monitoring** serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana.
- d. **Badan Usaha.** Model kelembagaan ini menjamin pelayanan masyarakat dengan lebih baik. Kerjasama ini mencakup kesepakatan para pihak semata menjadi *shareholder*, bukan menjadi pelaksana, kesepakatan dilakukan untuk membentuk atau mengkontrak organisasi profesional. Kekuatan model ini berupa perjanjian yang dituangkan dalam konstitusi lembaga (AD dan ART) sehingga menyediakan sanksi juga adanya informasi dan toleransi antar anggota.

B. Teori Pendukung

1. Teori Media Baru

Di dalam bukunya "*Teori Komunikasi Massa*", MacQuill (2011) mengatakan bahwa Media Baru yang dibahas disini adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama, yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Dewasa ini, Media baru sangat beragam dan tidak mudah didefinisikan. Namun dalam perkembangannya, media baru dan penerapannya dalam berbagai wilayah memasuki ranah komunikasi massa atau secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak terhadap media massa tradisional atau konvensional. Fokus perhatian terutama pada aktivitas kolektif bersama yang berjudul 'Internet', terutama pada penggunaan publik, seperti berita daring, iklan, aplikasi penyiaran (termasuk mengunduh musik, dan lain-lain), forum dan aktivitas diskusi, *world wide web* (WWW), pencarian informasi, dan potensi pembentukan komunitas tertentu.

Aspek paling mendasar dari Teknologi Informasi dan komunikasi(TIK) adalah fakta *digitalisasi*, proses di mana semua teks (makna simbolik dalam bentuk yang telah direkam dan dikodekan) dapat dikurangi menjadi kode biner dan dapat mengalami proses produksi, distribusi, dan penyimpanan yang sama. Konsekuensi potensial yang paling terkenal dari lembaga media adalah *konvergensi* antara semua bentuk media dalam kaitannya dengan pengaturan, distribusi, penerimaan dan regulasi mereka. Sebagaimana yang telah kita saksikan, banyak bentuk media massa yang bertahan, mempertahankan identitas mereka, dan bahkan terus berkembang. Lembaga

media massa umum juga bertahan sebagai elemen penting dari kehidupan sosial publik, dikuatkan karena posisinya yang penting bagi politik dan perdagangan. 'media elektronik baru' dapat dilihat awalnya sebagai tambahan atas spektrum yang sudah ada alih-alih sebagai pengganti. Di lain pihak, kita harus mempertimbangkan bahwa digitalisasi dan konvergensi dapat memiliki konsekuensi yang lebih revolusioner.

Percobaan untuk mencirikan media baru, terutama sebagaimana yang dilambangkan oleh Internet, telah dihambat oleh keragaman penggunaan dan pengawasan sebagaimana juga ketidakpastian masa depan mereka. Komputer yang diterapkan pada komunikasi telah memproduksi banyak kemungkinan varian, tidak ada satu pun yang dominan. Postmes dan kawan-kawan (1998) menggambarkan komputer sebagai teknologi komunikasi yang 'secara unik tidak berdedikasi'. Dalam pemikiran yang sama, Poster (1999) menggambarkan inti dari Internet sebagai 'tidak berkarakter', tidak hanya karena keragaman serta ketidakpastiannya di masa depan, tetapi juga karena karakternya yang secara esensial postmodern. Ia juga menunjuk pada perbedaan utama dari penyiaran dan percetakan sebagaimana yang disebutkan berikut:

Media baru mengabaikan pembatasan percetakan dan model penyiaran dengan (1) memungkinkan terjadinya percakapan antar-banyak pihak; (2) memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya; (3) mengganggu kegiatan komunikasi dari posisi

pentingnya, dari hubungan kewilayahan dari modernitas; (4) menyediakan kontak global secara instan; dan (5) memasukkan subjek modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan (Poster, 1999: 15).

Secara lebih singkat, Livingstone (1999: 65) menulis “apa yang baru mengenai Internet barangkali adalah kombinasi dari interaktivitas dengan ciri yang inovatif bagi komunikasi massa-jenis konten yang tidak terbatas, jangkauan khalayak, sifat global dari komunikasi.” Pandangan ini menyarankan penambahan alih-alih penggantian. Sebuah penilaian dibuat lima tahun sesudah ini oleh Lievrouw (2004) manggarisbawahi pandangan umum bahwa ‘media baru’ telah menjadi ‘semakin umum’(*mainstream*), rutin, dan ‘banal’. Penelitian mengenai komunikasi politik membahas mengenai ‘normalisasi’ Internet yang berarti aplikasi Internet terhadap kebutuhan untuk bentuk mapan dari kampanye (Vaccari, 2008b). benar bahwa penerapan dan penggunaan tidak menjadi euforia dari ***hype*** klaim awal dan pandangan untuk masyarakat atau pengharapan untuk keuntungan, tetapi masih terlalu awal untuk membuat penilaian.

Ada beberapa ciri kunci yang menunjukkan bahwa inovasi Internet belum dipelajari secara layak. Salah satunya adalah konsep baru dan realitas dari portal web. Kalyanaraman dan Sundar (MacQuill. 2011) menunjukkan bahwa ‘salah satu ciri unik dari *world wide web* sebagai media massa terletak pada fakta bahwa sumber pesan tidak dibedakan dari penerima pesan’. Hasilnya

adalah portal yang membantu mengambil dan menyaring banyak informasi yang tersedia.

Dalam penerapan teori media pada media baru, dapat diidentifikasi lima kategori utama 'media baru' yang sama-sama memiliki kesamaan saluran tertentu dan kurang lebih dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, konten, dan konteks, seperti berikut ini:

- 1) *Media komunikasi antarpribadi (interpersonal communication media)* meliputi telepon (yang semakin mobile) dan surat elektronik (terutama untuk pekerjaan, tetapi menjadi semakin personal). Secara umum, konten bersifat pribadi dan mudah dihapus dan hubungan yang tercipta dan dikuatkan lebih penting daripada informasi yang disampaikan.
- 2) *Media permainan interaktif (interactive play media)*. Media ini terutama berbasis *komputer* dan *video game*, ditambah peralatan realitas virtual. Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan mungkin dominasi dari kepuasan 'proses' atas 'penggunaan'.
- 3) *Media pencarian informasi (information search media)*. Ini adalah kategori yang luas, tetapi Internet/WWW merupakan contoh yang paling penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data yang ukuran, aktualitas, dan aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya. Posisi mesin pencari telah menjadi sangat penting sebagai alat bagi para pengguna sekaligus sebagai sumber pendapatan untuk Internet. Di samping Internet, telepon (*mobile*) juga semakin menjadi saluran

penerimaan informasi, sebagaimana juga terteks yang disiarkan dan layanan data radio.

- 4) *Media partisipasi kolektif (collective participatory media)*. Kategori khususnya meliputi penggunaan Internet untuk berbagi dan bertukar informasi, gagasan, dan pengalaman, serta untuk mengembangkan hubungan pribadi aktif (yang diperantarai komputer). Situs jejaring sosial termasuk di dalam kelompok ini. Penggunaanya berkisar dari yang murni peralatan hingga afektif dan emosional
- 5) *Substitusi media penyiaran (substitution of broadcasting media)*. Acuan utamanya adalah pengguna media untuk menerima atau mengunduh konten yang di masa lalu biasanya disiarkan atau disebarkan dengan metode lain yang serupa. Menonton film dan acara televisi atau mendengarkan radio dan musik adalah kegiatan utama.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Masalah pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi telah menjadi obyek penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya. Diantara hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan berikut ini.

1. *Ali Murtadha M. Arifin (2009) dengan judul Sistem Informasi di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah*. Menyimpulkan bahwa otonomi daerah dapat mengubah sistem Informasi di daerah tersebut. Sistem informasi juga mempengaruhi kelanjutan pertumbuhan

pembangunan. Sistem informasi atau pesan pemerintah perlu dikemas dan disiarkan melalui media cetak maupun elektronik sehingga dapat diperoleh / dinikmati oleh publik. Sistem informasi pada masa Orde Baru berbeda dengan sistem informasi di era pasca Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem informasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat sedangkan pada era otonomi daerah, sistem informasi ditentukan oleh Pemerintah setempat (Daerah).

2. *Ali Murtadha M. Arifin (2009) dengan judul Sistem Informasi Pemerintahan Pada Otonomi Daerah di Pemerintahan Kota Pekanbaru.* Mengemukakan bahwa otonomi daerah dapat mengubah sistem informasi di Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada masa otonomi, informasi mengenai kebijakan dan pesan-pesan Pemerintah disampaikan oleh bagian Humas kepada masyarakat dengan cara mengundang wartawan dari berbagai media dan dipublikasikan melalui media massa. Informasi tersebut berisi berbagai materi kegiatan Pemerintah Kota setempat, beragam regulasi, dan berbagai informasi pemerintahan lainnya, baik tentang perekonomian, kesejahteraan rakyat, maupun perkebunan. Sistem informasi di kota Pekanbaru setelah otonomi daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat, berbeda dengan era sebelum otonomi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
3. *Muhammad Syahban Sidiq (2011). Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dalam Rekrutmen Kader Partai Keadilan Sejahtera.*

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mengkaji tentang pemanfaatan jaringan komunikasi dalam rekrutmen kader Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan (PKS Sulsel) dengan berfokus pada orientasi pada analisis jaringan komunikasi, proses komunikasi dalam jaringan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan jaringan komunikasi dalam rekrutmen kader.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Dari penelitiannya ditemukan bahwa model jaringan komunikasi dalam rekrutmen kader PKS Sulsel dikembangkan dengan pola linear dengan menggunakan kekuatan jaringan kader partai untuk menyentuh semua kalangan masyarakat. Proses pemanfaatan jaringan dimulai dengan sebelumnya membangun hubungan komunikasi yang efektif dalam jaringan. Ada faktor yang mempengaruhi jaringan komunikasi adalah pemahaman kader.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan terkait teori jaringan komunikasi seperti jaringan komunikasi yang terwadahi dalam rekrutmen kader melalui tarbiyah untuk diimplementasikan ke dalam organisasi lainnya serta perlunya pendalaman dan kontinuitas penelitian yang sama untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian, terutama dalam penelitian jaringan komunikasi.

D. Kerangka Berpikir

Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau mengendalikan organisasi atau suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi itu sendiri memiliki beberapa aktifitas yaitu input, proses, output penyimpanan dan pengendalian.

Jaringan komunikasi ini merupakan jenis umum pola komunikasi kelompok dan dapat dijumpai kebanyakan pada kelompok dan organisasi. Di samping itu jaringan komunikasi terutama pada organisasi dimulai ketika orang-orang dalam jabatan itu mulai berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga berkembanglah keteraturan dalam kontak dan lokasi setiap individu dalam pola dan jaringan yang terjadi memberikan peranan pada orang tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pendayagunaan sistem jaringan informasi dan komunikasi pada asosiasi pemerintah kota se Indonesia (APEKSI), atau dengan kata lain yang menjadi fokus dari penelitian adalah menganalisis maksimalisasi elemen sistem informasi yang meliputi *hardware*, *software*, prosedur, data dan *humanware* dalam hal menentukan suatu pengambilan keputusan asosiasi tersebut. Di samping itu penelitian juga mengidentifikasi dan menganalisis pola atau struktur dan proses jaringan komunikasi antar anggota asosiasi tersebut serta pemetaan peranan masing-

masing anggota tersebut dan pencapaiannya dalam jaringan komunikasi di organisasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka pikir pada

halaman berikut:



Gambar 4. Kerangka Berpikir